



Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam Mendukung Pengembangan Koperasi dan Perdagangan Jember

Siti Indah Purwaning Yuwana^{*}, Anggun Dwi Rahayu², Azza 'Aqilla Zaharani³, Winda Amelia Adista⁴

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹[*indah.yuwana@gmail.com](mailto:indah.yuwana@gmail.com), ²anggundrahayu26@gmail.com, ³azzaaqilla38026@gmail.com, ⁴windaamladsta@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam mendukung pengembangan koperasi dan UMKM melalui pelaksanaan tugas pada bidang kelembagaan dan pengawasan, perdagangan, serta sarana prasarana. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut serta melihat bentuk dukungan yang diberikan kepada koperasi dan UMKM. Kegiatan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dukungan dilakukan melalui sosialisasi, BIMTEK, pelatihan, konsultasi, pendampingan, monitoring, penyediaan sarana usaha, serta fasilitasi kegiatan perdagangan dan UMKM. Kebaruan terletak pada penggambaran pelaksanaan tugas ketiga bidang secara terpadu berdasarkan pengalaman dan kondisi yang ditemukan secara langsung selama PPL. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan SDM, digitalisasi pelaporan, peningkatan sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi diperlukan agar pembinaan dan pengawasan koperasi serta pengembangan UMKM dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, koperasi, perdagangan, sarana dan prasarana

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha bersama yang memiliki peran dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan koperasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan usaha, tetapi juga dengan kelembagaan, pengelolaan organisasi, dan partisipasi anggota. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat koperasi yang menghadapi kendala, seperti pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang belum optimal, keterbatasan kemampuan pengurus dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, serta kurangnya pemahaman mengenai tata kelola koperasi. Kondisi tersebut membuat pembinaan dan pengawasan diperlukan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan kelembagaan dan usahanya dengan baik. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Indonesia, 1992)

Permasalahan juga terdapat pada kegiatan perdagangan yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Kegiatan perdagangan, terutama di pasar, membutuhkan tempat berjualan yang layak serta fasilitas yang mendukung, seperti kios, los, tempat parkir, kebersihan, dan fasilitas umum lainnya. Sarana dan prasarana yang kurang terawat dapat mengurangi kenyamanan pedagang dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan tugas pemerintah dalam penataan perdagangan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan fasilitas yang digunakan oleh pedagang dan masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu kegiatan perdagangan berjalan dengan tertib dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pembinaan dan pendampingan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan koperasi. (Setianingrum et al., 2024) melakukan kegiatan pengabdian mengenai peningkatan efektivitas Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk meningkatkan partisipasi anggota dan kesehatan koperasi. Kegiatan tersebut melibatkan pengurus, pengawas, dan anggota koperasi dalam pelaksanaan RAT serta penilaian kesehatan koperasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.

(Emrizal & Primadona, 2022) melakukan kegiatan pembinaan koperasi menuju sistem pelaporan keuangan digital. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu koperasi dalam meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan secara digital. Penggunaan sistem digital dalam pelaporan dapat membantu koperasi melakukan pencatatan dengan lebih tertib dan mempermudah proses pengelolaan data. Kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pengurus menjadi bagian penting dalam pengelolaan koperasi.

(Habibullah et al., 2023) melaksanakan kegiatan sosialisasi koperasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai koperasi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat koperasi serta mendorong masyarakat untuk lebih memahami keberadaan koperasi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan

tersebut memperlihatkan bahwa pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat masih diperlukan dalam mendukung perkembangan koperasi.

(Adnyana et al., 2023) melakukan pendampingan sistem pelaporan perkembangan koperasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan koperasi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan permasalahan pelaporan yang masih dilakukan secara manual serta kendala dalam pengumpulan dan pengelolaan data koperasi. Pendampingan dilakukan untuk membantu proses pelaporan agar lebih teratur dan mendukung pengawasan terhadap perkembangan koperasi. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaporan dan pengelolaan data menjadi bagian yang penting dalam pembinaan koperasi.

Pada bidang perdagangan, (Rismayani et al., 2024) melakukan kegiatan pengembangan kompetensi manajemen strategi bagi pengelola pasar rakyat di Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola pasar dalam menghadapi persaingan dan mengelola pasar rakyat. Pengelolaan pasar tidak hanya membutuhkan kondisi fasilitas yang baik, tetapi juga kemampuan pengelola dalam menjalankan kegiatan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pengelola juga diperlukan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan perdagangan.

Kelima kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan koperasi, peningkatan kemampuan pengurus, pelaporan, sosialisasi, dan pengelolaan pasar telah banyak dilakukan. Namun, pembahasan dalam kegiatan sebelumnya lebih banyak berfokus pada satu bidang. Setianingrum et al. (2024) membahas efektivitas RAT dan kesehatan koperasi, Adnyana et al. (2023) membahas pelaporan dan tata kelola koperasi, sedangkan Rismayani et al. (2024) membahas kemampuan pengelola pasar. Belum banyak kegiatan yang melihat pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam bidang koperasi dan perdagangan secara bersamaan, terutama yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan koperasi serta penyediaan sarana dan prasarana perdagangan. Selain itu, dukungan pemerintah daerah melalui pelatihan, permodalan, pemasaran, dan kerja sama juga dapat membantu pengembangan koperasi dan UMKM (Dianingratri & Munandar, 2022).

Kondisi tersebut menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember. Pelaksanaan tugas dinas mencakup pembinaan dan pengawasan koperasi, kegiatan perdagangan, serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan pembinaan koperasi, pelaksanaan RAT, pengelolaan administrasi dan pelaporan, kondisi sarana prasarana, serta luas wilayah Kabupaten Jember. Kondisi tersebut menjadi bagian yang perlu dilihat untuk mengetahui pelaksanaan tugas dinas di lapangan.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada pembahasan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember dengan melihat bidang koperasi dan perdagangan secara bersamaan. Pembahasan tidak hanya melihat pembinaan dan pengawasan koperasi, tetapi juga pelaksanaan tugas dalam kegiatan perdagangan serta penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam mendukung pengembangan koperasi dan perdagangan di Kabupaten Jember. Kegiatan ini juga melihat faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas tersebut, baik dalam pembinaan dan pengawasan koperasi maupun dalam kegiatan perdagangan dan penyediaan sarana prasarana. Hasil kegiatan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas dinas di lapangan serta menjadi bahan untuk melihat bagian yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung kegiatan koperasi dan perdagangan di Kabupaten Jember.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam mendukung pengembangan koperasi dan perdagangan di Kabupaten Jember. Kegiatan ini merupakan bagian dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember. Data yang digunakan diperoleh dari kegiatan dan kondisi yang ditemukan secara langsung selama pelaksanaan PPL, khususnya pada bidang kelembagaan dan pengawasan, perdagangan, serta sarana prasarana.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan dan pelaksanaan tugas pada bidang yang menjadi fokus kegiatan. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan kegiatan untuk memperoleh informasi mengenai tugas yang dilaksanakan, bentuk pembinaan dan pelayanan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dokumentasi berupa foto dan dokumen kegiatan digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi yang diperoleh berdasarkan fokus kegiatan. Data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih, disusun, kemudian diuraikan sesuai dengan pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang. Hasil kegiatan selanjutnya dianalisis menggunakan konsep peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Konsep tersebut digunakan untuk melihat bentuk

pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam mendukung pengembangan koperasi dan perdagangan di Kabupaten Jember.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara informasi yang disampaikan dengan kondisi yang ditemukan selama pelaksanaan PPL. Dengan cara tersebut, data yang digunakan dalam pembahasan dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Tugas Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), bidang kelembagaan dan pengawasan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi di Kabupaten Jember. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi perkoperasian, *BIMTEK*, pelatihan, layanan konsultasi, pendampingan, serta monitoring. Kegiatan tersebut ditujukan untuk membantu koperasi dalam menjalankan kegiatan kelembagaan dan usahanya serta meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi.

Pengawas Koperasi Ahli Pertama menjelaskan bahwa pembinaan diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan koperasi. Kegiatan pembinaan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai kelembagaan, tetapi juga mencakup pemenuhan kewajiban koperasi seperti pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, koperasi juga diberikan pemahaman mengenai pengelolaan usaha, manajemen risiko, penyusunan rencana usaha, pemasaran, serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia.

Penata Layanan Operasional menambahkan bahwa kegiatan pembinaan juga dilakukan melalui pemetaan kondisi koperasi, konsultasi, pendampingan, dan monitoring. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui kondisi koperasi sehingga pembinaan dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan koperasi yang belum tertib dalam melaksanakan RAT dan pelaporan keuangan. Sebagian pengurus juga masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk melakukan pelaporan. (Pradana & Husaein, 2023; Suprpti et al., 2024)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan koperasi tidak cukup dilakukan hanya melalui penyampaian informasi, tetapi juga membutuhkan pendampingan secara langsung. Hasil ini sejalan dengan kegiatan Setianingrum et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pendampingan dalam pelaksanaan RAT dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi anggota serta mendukung kesehatan koperasi.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan koperasi juga menghadapi beberapa kendala. Luas wilayah Kabupaten Jember menjadi salah satu faktor yang membuat pengawasan dan pendampingan secara langsung belum dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran untuk kegiatan *BIMTEK* serta pengawasan juga menjadi kendala. Selain itu, terdapat pengurus koperasi yang kurang aktif dalam mengikuti pembinaan dan masih terdapat data koperasi yang perlu diperbarui. Kondisi keterbatasan pembinaan, kepatuhan pelaporan, dan pengawasan juga ditemukan dalam penelitian mengenai pembinaan dan pengawasan koperasi oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan tugas pada bidang ini dapat dilihat sebagai bentuk peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator terlihat dari pemberian konsultasi, pelatihan, pendampingan, dan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan koperasi. Sementara itu, peran sebagai dinamisator terlihat dari upaya mendorong koperasi agar lebih aktif dalam menjalankan kewajiban kelembagaan dan meningkatkan kemampuan pengurus (Tumija, 2022)

b. Pelaksanaan Tugas Bidang Perdagangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan, tugas pokok Bidang Perdagangan adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar produk lokal serta pengawasan barang beredar di Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaannya, Bidang Perdagangan menjalankan beberapa program dan kegiatan, yaitu pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), misi dagang dalam negeri, operasi pasar dan pasar murah untuk stabilisasi harga Bapokting, rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG), tera ulang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi, serta pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG).

Menurut Kepala Bidang Perdagangan, pemantauan pasar dilakukan secara rutin dengan memantau harga dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pemantauan tersebut dilakukan terhadap 20 komoditas yang masuk dalam data komoditas pangan. Selain pemantauan pasar, Bidang Perdagangan juga melaksanakan operasi pasar dan pasar murah di lima pasar pantauan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka membantu menjaga kondisi harga dan ketersediaan barang di pasar.

Untuk mendukung kelancaran distribusi, Kepala Bidang Perdagangan menjelaskan bahwa dilakukan sinergi rantai pasokan dengan menggandeng Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dan pelaku usaha. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperlancar pasokan dan distribusi barang. Selain kegiatan tersebut, Bidang Perdagangan juga melakukan pemantauan harga pasar, pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, serta penertiban izin tempat usaha atau peredaran bahan khusus.

Dalam pengawasan alat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, Kepala Bidang Perdagangan menyampaikan bahwa Unit Pelaksana Teknis Metrologi melakukan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) pada sektor jasa maupun perdagangan. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari kegiatan bidang perdagangan dalam memastikan penggunaan alat ukur, takar, dan timbang dalam kegiatan perdagangan.

Dalam menjalankan berbagai kegiatan tersebut, Kepala Bidang Perdagangan menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kepatuhan usaha, ketidaksesuaian dokumen usaha, dinamika pasar dan sektor informal, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Kendala tersebut menjadi bagian dari kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perdagangan di Kabupaten Jember.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian (Masruroh & Fadli, 2022) mengenai *Gerak Kuasa Negara dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia*. Penelitian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah dalam mengatur kegiatan perdagangan melalui kelembagaan dan kebijakan. Keterlibatan pemerintah diperlukan agar kegiatan perdagangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Temuan tersebut sejalan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Kabupaten Jember yang menjalankan pengawasan, pengendalian, dan penertiban dalam kegiatan perdagangan.

c. Penyediaan dan Pemanfaatana Sarana Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Layanan Bidang Sarana Prasarana, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perdagangan. Sarana yang disediakan untuk kegiatan perdagangan antara lain komputer dan printer untuk mendukung administrasi, alat kebersihan pasar seperti sapu lidi dan cakar besi, tempat sampah, serta truk sampah. Sementara itu, prasarana yang disediakan di pasar meliputi bangunan pasar, kios dan los untuk tempat berjualan, kamar mandi, tempat parkir, serta fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan perdagangan.

Menurut Operator Layanan, sarana dan prasarana yang telah disediakan selama ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh pedagang sesuai dengan fungsi masing-masing. Keberadaan fasilitas tersebut membantu kegiatan perdagangan, terutama dalam menyediakan tempat berjualan serta fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian (Sri & Amalia, 2020) yang menunjukkan bahwa penataan pasar oleh pemerintah tidak hanya berkaitan dengan tempat berjualan, tetapi juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana, kebersihan, serta keamanan pasar.

Meskipun demikian, beberapa sarana dan prasarana mulai mengalami penurunan kondisi. Operator Layanan menjelaskan bahwa beberapa komputer mulai lambat ketika digunakan dan kondisi printer tidak lagi sebaik sebelumnya. Alat-alat kebersihan juga mengalami penurunan kualitas. Pada prasarana pasar, beberapa kios dan los mengalami kerusakan karena usia. Bangunan pasar juga mulai mengalami kerusakan pada beberapa bagian sehingga membutuhkan perbaikan. Selain itu, terdapat kamar mandi yang lantainya jebol sehingga tidak dapat digunakan.

Dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana, Operator Layanan menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa kendala. Pengguna perlu lebih memperhatikan penggunaan sarana, misalnya mengecek tinta printer dan mematikan komputer dengan cara yang benar. Pedagang juga perlu menjaga dan merawat kios serta los yang telah disediakan. Selain masalah penggunaan, pemeliharaan sarana dan prasarana juga membutuhkan anggaran setiap tahun. Namun, anggaran yang tersedia belum tentu dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan sehingga harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan prioritas.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Operator Layanan menjelaskan bahwa dinas berusaha memilih sarana dengan kualitas yang baik serta memberikan edukasi mengenai cara penggunaan dan perawatan yang benar. Dinas juga memberikan arahan dan sosialisasi kepada pengguna kios dan los agar fasilitas yang telah diberikan dapat dirawat dengan baik. Selain itu, sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan dipilah setiap tahun sehingga perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhannya.

Hal lain yang masih perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusia, terutama kesadaran pengguna dalam memanfaatkan dan menjaga sarana prasarana yang telah disediakan. Menurut Operator Layanan, pengguna perlu memahami bahwa menjaga fasilitas akan lebih baik daripada menunggu sampai terjadi kerusakan dan kemudian melakukan perbaikan. Selain itu, pemilihan sarana dengan kualitas terbaik serta penentuan prasarana yang menjadi prioritas perbaikan juga perlu terus diperhatikan agar fasilitas yang tersedia dapat digunakan secara maksimal.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember didukung oleh adanya berbagai program pembinaan, pelatihan, layanan konsultasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan. Koordinasi antara pegawai dengan pihak yang berkaitan dengan koperasi dan perdagangan juga membantu kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Pada bidang koperasi, kegiatan pembinaan dan pengawasan didukung melalui sosialisasi, BIMTEK, pelatihan, pendampingan, serta layanan konsultasi. Sementara itu, pada Bidang Perdagangan, dukungan terlihat dari kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan Bapokting, operasi pasar, pasar murah, serta kerja sama dengan Bulog, PT RNI, dan pelaku usaha dalam menjaga pasokan dan distribusi barang. Kegiatan rekomendasi TDG, tera ulang melalui UPT Metrologi, dan pengelolaan SRG juga turut mendukung fungsi pelayanan dan pengawasan perdagangan. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana seperti komputer, printer, tenda UMKM, kios, bangunan pasar, kendaraan, dan fasilitas pendukung lainnya membantu menunjang kegiatan dinas dan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan pada masing-masing bidang. Pada bidang koperasi, kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan, luas wilayah Kabupaten Jember, serta masih adanya koperasi yang belum tertib dalam pelaksanaan RAT dan pelaporan keuangan. Kemampuan sebagian pengurus dalam menggunakan teknologi juga masih terbatas. Pada Bidang Perdagangan, hambatan yang dihadapi berupa rendahnya kepatuhan pelaku usaha, ketidaksesuaian dokumen usaha, dinamika pasar dan sektor informal, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sementara itu, pada bidang sarana dan prasarana, beberapa peralatan mulai mengalami penurunan kondisi sehingga membutuhkan pemeliharaan atau penggantian. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran pekerjaan dan pelayanan apabila tidak ditangani sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember tidak hanya ditentukan oleh program yang telah ditetapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, koordinasi antar pihak, serta kepatuhan dan kerja sama dari koperasi maupun pelaku usaha yang dibina. Hal ini sejalan dengan Dianingratri dan Munandar (2023) yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan, pembinaan, dan koordinasi menjadi bagian penting dalam pengembangan koperasi dan UMKM.

e. Analisis Peran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Perdagangan, serta Bidang Sarana dan Prasarana, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember dapat dianalisis melalui empat peran pemerintah, yaitu regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Keempat peran tersebut terlihat dalam kegiatan pembinaan, pengawasan, pelayanan, penyediaan fasilitas, serta kerja sama dengan berbagai pihak.

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran regulator terlihat melalui pengaturan dan pengawasan kegiatan koperasi, perdagangan, serta penggunaan sarana prasarana. Pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, hal tersebut dilakukan melalui pengawasan RAT, pelaporan keuangan, pemeriksaan kesehatan koperasi, dan kepatuhan terhadap AD/ART serta peraturan yang berlaku. Pada Bidang Perdagangan, peran regulator terlihat melalui pemantauan harga Bapokting, penertiban izin usaha, serta pengawasan UTTP melalui UPT Metrologi. Sementara pada Bidang Sarana dan Prasarana, pengaturan dilakukan melalui ketentuan penggunaan dan perawatan kios, los, serta fasilitas lainnya. Namun, masih ditemukan kendala berupa rendahnya kepatuhan sebagian koperasi dan pelaku usaha serta kurangnya kesadaran dalam menjaga fasilitas.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, dinas berupaya mendorong peningkatan kemampuan koperasi dan pelaku usaha melalui sosialisasi, BIMTEK, pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan monitoring. Pada Bidang Perdagangan, peran tersebut dilakukan melalui pemantauan pasar, operasi pasar, dan pasar murah untuk membantu menjaga kondisi perdagangan. Pada Bidang Sarana dan Prasarana, dinas memberikan arahan kepada pengguna agar fasilitas dapat digunakan dan dirawat dengan baik. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah kerja, kemampuan teknologi, serta kurangnya partisipasi sebagian pihak yang dibina.

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran fasilitator diwujudkan melalui pelayanan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas. Pada bidang koperasi, dukungan diberikan melalui konsultasi, pelatihan, pendampingan, serta bantuan dalam pengembangan manajemen, digitalisasi, pemasaran, kemitraan, dan permodalan. Pada Bidang Perdagangan, fasilitasi dilakukan melalui misi dagang, operasi pasar, pasar murah, rekomendasi TDG, tera ulang, dan pengelolaan SRG.

Sementara pada Bidang Sarana dan Prasarana, dinas menyediakan fasilitas seperti komputer, printer, tenda UMKM, kios, los, bangunan pasar, kamar mandi, tempat parkir, dan fasilitas pendukung lainnya. Kendalanya adalah beberapa sarana mulai mengalami penurunan kondisi dan membutuhkan pemeliharaan atau penggantian.

4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Sebagai katalisator, dinas berupaya mempercepat penyelesaian masalah dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, hal ini dilakukan melalui penanganan pengaduan, konsultasi, mediasi, pemberian rekomendasi, serta tindak lanjut pembinaan dan monitoring. Pada Bidang Perdagangan, peran tersebut terlihat melalui kerja sama dengan Bulog, PT RNI, dan pelaku usaha dalam menjaga pasokan dan distribusi barang. Pada Bidang Sarana dan Prasarana, dinas menentukan fasilitas yang perlu diperbaiki berdasarkan kondisi dan prioritas serta mendorong pengguna ikut menjaga fasilitas. Hambatan yang masih ditemukan meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, luas wilayah, serta kurangnya kerja sama dari sebagian pihak.

Dengan demikian, keempat peran pemerintah tersebut saling berkaitan dalam pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember. Regulator berperan dalam pengaturan dan pengawasan, dinamisator dalam pembinaan dan pemberian dorongan, fasilitator melalui pelayanan dan penyediaan fasilitas, sedangkan katalisator melalui kerja sama dan penyelesaian permasalahan. Keempat peran tersebut diterapkan pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Perdagangan, serta Sarana dan Prasarana dalam mendukung kegiatan koperasi dan perdagangan di Kabupaten Jember.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan, pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Perdagangan, serta Bidang Sarana dan Prasarana telah mendukung pengembangan koperasi dan kegiatan perdagangan di Kabupaten Jember. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, konsultasi, pendampingan, pengawasan, pemantauan perdagangan, serta penyediaan sarana dan prasarana. Pelaksanaan tugas tersebut juga menunjukkan empat peran pemerintah, yaitu sebagai regulator melalui pengaturan dan pengawasan, dinamisator melalui pembinaan dan pemberian dorongan, fasilitator melalui pelayanan dan penyediaan fasilitas, serta katalisator melalui kerja sama dan penyelesaian permasalahan.

Namun, pelaksanaan tugas masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, luas wilayah Kabupaten Jember, belum tertibnya sebagian koperasi dalam RAT dan pelaporan keuangan, keterbatasan kemampuan teknologi, rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, serta kondisi sarana dan prasarana yang mulai menurun. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan dan pengawasan, pembaruan data koperasi, penguatan koordinasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai kebutuhan dan prioritas. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dinas dalam mendukung koperasi, perdagangan, dan kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan dan membantu selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah memberikan informasi, membantu proses observasi dan dokumentasi, serta mendukung kelancaran kegiatan PPL. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. N. W., Sandhiyasa, I. M. S., & Kherismawati, N. P. E. (2023). Pendampingan Sistem Pelaporan Perkembangan Koperasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi di Kecamatan Kerambitan. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 284–292.
- Dianingratri, R., & Munandar, Moh. A. (2022). Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019. *Unnes Political Science Journal*, 6(2), 36–41. <https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.42007>
- Emrizal, & Primadona. (2022). Pembinaan Koperasi Menuju Sistem Pelaporan Keuangan Digital Di Kota Padang. *Krida Cendekia*, 1(6), 25–29. <http://kridacendekia.com/index.php/jkc/article/view/64>

- Habibullah, S., Puspitasari, I., Yansyah, M., & Syah, T. A. (2023). *Sosialisasi koperasi pada ibu ibu pkk pekon gunung sari kecamatan ulubelu kabupaten tanggamus*. 4(4), 7591–7596. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/19100>
- Indonesia, R. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. 1–57.
- Masruroh, N., & Fadli, A. (2022). Gerak Kuasa Negara Dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia. *International Proceedings*, 1, 151–166. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12781/1/ACIEH%2C%2BVol.%2B1%2B-%2B11.%2BNikmatul%2BMasruroh%2BGERAK%2BKUASA%2BNEGARA%2BDALAM%2BPERDAGAN%2BKOMODITAS.pdf>
- Pradana, L. Y., & Husaein, A. (2023). Peningkatan Pelayanan Pada Koperasi Di Kota Jambi Melalui Digitalisasi Koperasi. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, 17(1), 106–115. <https://doi.org/10.33998/mediasisfo.2023.17.1.738>
- Rismayani, R., Tricahyono, D., & Manuel, B. (2024). *Aksiologiya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi untuk Pengelola Pasar Rakyat di Kabupaten Bandung*. 8(3), 355–360. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Axiologiya/article/view/14114>
- Setianingrum, N., Kholipah, S., & Munawwarah, K. (2024). *Strategi Peningkatan Efektivitas Rapat Anggota Tahunan (RAT) Dalam Meningkatkan Partisipasi Dan Kesehatan Koperasi*. 2, 316–322.
- Sri, N. S. K., & Amalia, D. I. (2020). *Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP dan UKM) Dalam Penataan Pasar Podosugih Kota Pekalongan*. 9(2), 456–465.
- Suprpti, T., Rohmat, C. L., Muhaimin, A., & Nurmala, A. S. (2024). Peningkatan Kompetensi Digital Pengurus Koperasi Melalui Pelatihan Operator Komputer Madya. *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 272–278. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/5177/3548>
- Tumija, T. (2022). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 25–37. https://www.researchgate.net/publication/365395444_Peran_Pemerintah_dan_Partisipasi_Masyarakat_dalam_Peningkatan_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah_UMKM_pada_Masa_Pandemi_COVID-19_di_Cipageran_Cimahi/fulltext/6373cb3f431b1f53009f6a1e/Peran-Pemerintah-dan-Part